



**DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMBUMIHAN PANCASILA
DAN
DOKTER BHINNEKA TUNGGAL IKA**

REKOMENDASI KEBANGSAAN

**DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMBUMIHAN PANCASILA
DAN DOKTER BHINNEKA TUNGGAL IKA
DALAM RANGKA MERAYAKAN HARI LAHIR PANCASILA KE-77,
HARI ULANG TAHUN GERAKAN PEMBUMIHAN PANCASILA KE-3
DAN DOKTER BHINNEKA TUNGGAL IKA KE-5**

No. 014/RK/DPPGPP-DBTI/VI/2022

Salam Pancasila !!!!

Perayaan Hari Lahir Pancasila ke - 77 tahun merupakan momentum bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia, karena untuk pertama kalinya dirayakan di Ende, “Kota Rahim Pancasila” dan ditandai dengan keputusan politik Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia sebagai inspektur upacara dalam Perayaan Harlah ke-77. Peristiwa penting ini menjadi refleksi perjuangan bangsa, terutama terkait dengan manifestasi ‘Indonesia Menggugat; ‘Mencapai Indonesia Merdeka’, dan pembuangan Bung Karno ke Ende. Perayaan ini juga merupakan saat yang tepat untuk menyadari makna pembuangan menjadi pencerahan politik kebangsaan yang memberikan dorongan kuat bagi bangsa Indonesia dalam melahirkan dasar negara Indonesia Merdeka.

Oleh karena itu, kepada Presiden RI, MPR RI, DPR RI, dan segenap Warga Negara Indonesia di seluruh Nusantara, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumihan Pancasila (DPP GPP) dan Dokter Bhinneka Tunggal Ika (DBTI) pada Perayaan Hari Lahir Pancasila ke-77 dan HUT GPP ke-3 dan HUT DBTI ke-5 dengan tulus, jujur, dan sungguh-sungguh menyampaikan rekomendasi kebangsaan berikut ini:

1. Eksistensi Ende sebagai rahim Pancasila perlu semakin disadari dan diyakini sepenuh-penuhnya. Untuk itu, perlu dilakukan **kajian akademik** yang mendalam dan menyeluruh untuk lebih mendukung sejumlah literasi yang telah ada selama ini. Hasil kajian akademik ini dapat dijadikan sebagai dasar diterbitkannya **UU atau Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai Ende Rahim Pancasila**,
2. Proses historis kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 melalui Pidato Sukarno merupakan titik kulminasi sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan sekaligus berhasil menjawab pertanyaan Ketua BPUPK saat itu tentang apa yang menjadi dasar negara Indonesia Merdeka. Untuk itu, Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2016 tentang **Hari Lahir Pancasila** sangatlah **perlu dikuatkan dengan TAP MPR RI atau Undang-Undang**. Dengan demikian, penempatan Hari Lahir Pancasila memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dalam tata Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
3. Oleh karena sedemikian banyaknya *legacy* yang diwariskan Bung Karno untuk bangsa dan negara Indonesia dan ‘julukan’ kehormatan yang dilekatkan pada Bung Karno, diantaranya: Bung Karno Putra Sang Fajar, Bapak Marhaenisme, Penggali Pancasila, Pemimpin Besar Revolusi, *Founding Fathers*, Proklamator, Presiden RI Pertama, Bapak Pandu Indonesia, Penyambung lidah rakyat, maka menjadi etis dan bijaksana sebagai wujud penghormatan sebuah bangsa beradab untuk **menetapkan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa melalui TAP MPR RI atau setidaknya-tidaknya dalam bentuk UU**.
4. Nama **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)** lebih tepat dan sesuai bila diganti menjadi **Badan Pembumihan Pancasila (BPP)**. Penggunaan konsep pembinaan memberi arti dan makna Badan ini melakukan pembinaan pada WNI yang bermasalah dengan Pancasila. Sementara itu, kata ideologi perlu diganti karena secara hakiki fungsi dan kedudukan Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, namun juga sebagai dasar negara dan spiritualitas bangsa.
5. Menghimbau **Presiden Republik Indonesia berkenan menggunakan Hak Prerogatif sebagai Kepala Negara** untuk menumpas dan ‘membumihanguskan’ seluruh kekuatan deideologisasi Pancasila, baik radikalisme-fundamentalisme transnasional-terorisme, maupun neokapitalisme, neoliberalisme, neoimperialisme, neokolonialisme, feodalisme, korupsi, dan oligarki dalam segala bentuk dan manifestasi sampai ke akar-akarnya.

Demikianlah Rekomendasi Kebangsaan ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua bangsa Indonesia

Salam Pancasila !!!

Jakarta, 1 Juni 2022

Dr. Antonius D.R. Manurung, M.Si.
Ketua Umum DPP GPP

Prof. Dr. Dr. Daldiyono, SpPD-KGEH
Sesepuh DBTI

100 % INDONESIA, 100 % PANCASILA

Sekretariat: Jl. Delima I No. 3 Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan - 12640

Telp: 021-78890001; HP/WA: 081318270369

E-mail: gerakanpembumihanpancasila@gmail.com; www.gppnews.id

Website: www.gerakanpembumihanpancasila.org